

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
(Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NUR SYAIFUL AMIN

C100120061

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
(Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NUR SYAIFUL AMIN

NIM. C100120061

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

NIK. 963

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
(Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi)**

Oleh:

NUR SYAIFUL AMIN

NIM. C100120061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 16 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardani, S.H., S.U.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaiyah Dimiyati SH., M.Hum.
NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 September 2018

Penulis



NUR SYAIFUL AMIN

NIM. C100120061

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
(Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi)**

Abstrak

Salah satu syarat sah dalam melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah usia calon mempelai, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) adanya ketentuan mengenai usia calon mempelai tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga yang baik, tetapi pada realitanya ada penyimpangan umur terhadap ketentuan tersebut seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk memahami, dan mengetahui faktor terjadinya penyebab adanya perkawinan di bawah umur serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakim dapat menerima pembuktian yang diajukan oleh pemohon sebelum memutuskan permohonan yang diajukan oleh pemohon, 2) Pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di bawah umur didasarkan pada kenyataan serta kondisi calon istri dan pemohon, 3) Upaya pencegahan yang dilakukan adalah bekerjasama antara Kemenag dengan BKKBN melalui sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang resiko pernikahan usia dini dari dirasa belum cukup efektif menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Boyolali

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan .

Abstract

One of the legitimate requirements of marriage in Law No. 1 1974 on Marriage is the age of the prospective bridegroom, 19 years for men and 16 years for women. As stated in Article 7 Paragraph (1), the provision concerning to the age of the prospective bride is proposed the future husband and wife who are going to marry and have matured the personality and physique. Thus, it can foster good households, otherwise the reality is a deviation of age against the provisions as referred to in Article 7 Paragraph (2). This research is intended to understand and to know the factors causing the occurrence of underage marriage and the basis of judge consideration in establishing marriage dispensation. The method used in this research is qualitative normative juridical. The results of this study: 1) The judge may accept the proof filed by the applicant before deciding the petition filed by the applicant, 2) The judge's consideration for the granting of an underage marriage dispensation is based on the facts and conditions of the prospective wife and the applicant; 3) The prevention effort undertaken is to cooperate between Kemenag with BKKBN through socialization-socialization to schools about the risk of marriage of the age of self from felt not enough effective to suppress the early marriage age in Boyolali District

Keywords: *Juridical Assessment, Underage marriage, Marriage Dispensation.*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi, menikah muda adalah sebuah hal yang bisa mereka lakukan di masa-masa aktif tersebut. Mereka lebih memilih menikah muda dengan berbagai alasan. Fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang sebagian penduduknya melakukan nikah muda. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah.

Fenomena pernikahan muda seperti dikutip dari *solopos.com* pada tanggal 1 Agustus 2014 menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) Boyolali sampai Desember tahun 2013 pernikahan dini di Boyolali hanya 13 orang untuk laki-laki dan 26 orang perempuan. Namun untuk tahun ini, catatan sampai Juni 2014 sudah ada kenaikan 50%, yakni 20 orang laki-laki di bawah umur yang menikah serta 35 perempuan di bawah umur.²

Kenaikan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun karena semakin banyak remaja yang menikah karena hamil dulu. Saat ini fenomena tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah kabupaten, karena menyangkut moralitas putra daerah. Mereka berusia dibawah 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan). Usia dibawah umur untuk laki-laki terdapat di 10 kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Musuk (4 orang). Sementara perempuan terkonsentrasi hanya di 5 kecamatan meliputi Ampel (8 orang),

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974

² *Solopos.com*, Jumat (1/8/2014) diakses 08 April 2017 jam 15.30 WIB

Karanggede (5), Musuk (2), Ngemplak (1) serta paling banyak di Boyolali Kota (19 perempuan).³

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.⁴

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.⁵ Secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.⁶ Atas dasar itulah hukum pernikahan menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Namun dalam melakukan pernikahan itu juga melihat kondisi serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula hukumnya.⁷

2. METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematika, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁸

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang

³ Kemenag, Kabupaten Boyolali tahun 2014

⁴ Abdul Shaheed, *Tinjauan Fiih Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Gaul I, 2009), 87

⁵ Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, h. 11.

⁶ Departemen Agama, 1983, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bagian Perawatan, h. 49.

⁷ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor : Kencana, h. 79.

⁸ Hamid Potilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2005), 93.

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakim dalam Menentukan Pembuktian atas Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Terkait Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Boyolali didapatkan data bahwa untuk menguatkan pembuktian atas apa yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon berkewajiban mengajukan pembuktian sehingga pembuktian yang diajukan dapat dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Boyolali terkait dengan permohonan dispensasi nikah di bawah umur, maka langkah pertama majelis hakim akan memeriksa, meneliti alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Setelah pemohon mengajukan bukti-buktinya kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur baru dapat untuk menarik suatu kesimpulan atas pembuktian tersebut.

Berdasarkan putusan pada Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bimengenai pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dalam pemeriksaan majelis hakim mendapatkan pembuktian sebagai berikut:

Telah menikah Pemohon dengan Istri Pemohon pada tanggal 22 Oktober 1995 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang

⁹Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif secara Benar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 56

anak yaitu seorang anak laki-laki, yang lahir tanggal 04 Februari 1997 dan seorang Anak perempuan yang lahir tanggal 20 Nopember 2000.

Pemohon yang tersebut di atas hendak menikahkan cucu kandung yang berumur 15 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali dengan calon suami yang lahir tanggal 15 Februari 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Berempat tinggal di Kota Semarang. Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dikarenakan belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah mengenal selama 2 tahun dan hubungannya sedemikian erat, dan bahkan Pemohon (calon pengantin perempuan) telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali menolak untuk menikahkan, karena belum cukup usia dan diberi surat keterangan Mohon Izin Dispensasi Perkawinan dari KUA tersebut Nomor : XXXXXX tanggal 8 April 2016; antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan dan pengajuan alat bukti dan diperkuat dengan keterangan pemohon dan juga calon istri maupun calon suami, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon dapat menjelaskan dengan baik duduk perkaranya dan juga dapat memperkuat dalil permohonannya dengan memberikan bukti tertulis.

3.2 Pertimbangan Hakim atas Dikabulkannya Permohonan Dispesasi Perkawinan di Bawah Umur Terkait Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai alasan untuk mengambil putusan telah melakukan upaya penemuan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk

menetapkan peraturan hukum umum kepada peristiwa hukum konkrit suatu peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit (*das sein*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara majelis hakim berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimana nantinya pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan perkara tersebut.

Pertimbangan hukum hakim yang menerima perkara dispensasi perkawinan dengan Nomor:0099/Pdt.P/2016/PA.Bi didasarkan pada pertimbangan:

Dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 dan 5 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Pemohon hendak menikahkan cucunya yang bernama Sri Wahyuni binti Slamet dengan Ari Setiadi tetapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai wanita;

Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan lama bahkan sudah hamil 3 bulan, oleh karenanya sudah dianggap aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun umurnya belum berusia 16 tahun ;

Antara calon mempelai wanita dengan calonmempelai pria tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan. Calon mempelai pria (Ari Setiadi) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.,- 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan bahwa Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan keterangan pihak keluarga. Kedua calon mempelai dan pihak keluarga yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan keluarga sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya, bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai sudah aqil baligh (dewasa), terlebih lagi calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil tiga bulan, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan tetapi karena yang bersangkutan sudah hamil tiga bulan, maka untuk memberikan perlindungan terhadap masa depan calon mempelai wanita dan anak yang berada dalam kandungannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, maka calon mempelai wanita dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Oleh karena calon mempelai laki-laki sudah dewasa dan sudah punya penghasilan, maka Majelis perlu mengemukakan Hadits Nabi s.a.w. sebagai berikut :

Artinya: Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat;

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan cucunya (calon mempelai wanita)

cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan. Permohonan Dispensasi Perkawinan termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dalil-dalil pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan oleh pemohon patutlah dikabulkan. Berdasarkan bukti surat-surat tertulis dan saksi-saksi terkait yang diajukan oleh Pemohon menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara permohonan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa majelis hakim telah memperoleh keterangan dari saksi-saksi terkait dan juga memperhatikan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini hakim menetapkan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI; dan 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan permohonan perkara dispensasi perkawinan pada tingkat pertama dengan Nomor:0099/Pdt.P/2016/PA.Bi di atas, hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah. Pertimbangan tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti surat tertulis saja, namun juga mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam hal ini saksi adalah calon istri dan calon suami.

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Boyolali dalam Mensikapi Fenomena Perkawinan di Bawah Umur

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk dan Pengadilan Agama Boyolali untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur ada beberapa langkah serta kebijakan antara lain:

Pertama, menolak permohonan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dengan melihat syarat-syarat terutama usia calon suami dan istri. Selain itu pihak KUA juga memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemohon tentang undang-undang yang berlaku dan resiko yang terjadi apabila permohonan nikah tersebut dikabulkan.

Kedua, melakukan kerjasama dengan komisi perlindungan anak dan BKKBN dengan fokus untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Upaya yang dilakukan yang dimulai pada tahun 2016 adalah dengan melakukan sosialisasi secara intensif dan bekerja sama dengan dinas pendidikan. Sosialisasi dilakukan ke sekolah-sekolah pada tingkatan SMP dan SMA. Sosialisasi juga dilakukan pada saat acara-acara resmi pemerintah, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2016 dimana pencegahan pernikahan usia dini dilakukan di lapangan terbuka dijadikan satu paket dengan sosialisasi KB.

Ketiga, hakim di Pengadilan Agama Boyolali sangat hati-hati dalam memutuskan pemohon untuk mengabulkan permohonan nikah terutama bagi calon yang belum cukup usia. Banyak pertimbangan yang dijadikan acuan seperti kondisi pemohon, kesiapan calon suami terutama penghasilannya karena terkait dengan kesiapan setelah pernikahan dilaksanakan. Setelah melihat kondisi pemohon dan kesiapan calon suami, hakim akan memutuskan dengan sebaik-baiknya permohonan dari pemohon.

Keempat, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Negara India, maka langkah ke depan bekerjasama dengan dinas pendidikan dengan membuat buku yang bertujuan memberikan pendidikan anak tentang hak anak dan umur yang legal untuk menikah dengan cara memasukkan ilustrasi berwarna yang memiliki pesan di kover belakang buku sekolah (kelas 3- kelas 8).

Upaya yang dilakukan Kemenag Kabupaten Boyolali dengan bekerjasama pada instansi-instansi lain menurut hemat penulis belum cukup untuk menurunkan angka pernikahan usia dini di kabupaten tersebut terbukti sampai penelitian ini dilakukan angka pengajuan untuk menikah usia dini masih tinggi. Dengan kondisi tersebut, pihak Kemenag bekerja sama dengan instansi lain dapat meniru ataupun mencontoh program yang dilaksanakan di negara India dengan membuat modul-modul tentang bahaya menikah usia dini.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkara dispensasi perkawinan pada tingkat pertama dengan Nomor:0099/Pdt.P/2016/PA.Bi yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Hakim Dalam Menentukan Pembuktian atas Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Terkait Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi. Berdasarkan penjelasan dan pengajuan alat bukti berupa surat keterangan dan diperkuat dengan keterangan pemohon dan juga calon istri maupun calon suami, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon dapat menjelaskan dengan baik duduk perkaranya dan juga dapat memperkuat dalil permohonannya dengan memberikan bukti tertulis. Mengacu pada hal ini, hakim dapat menerima pembuktian yang diajukan oleh pemohon sebelum memutuskan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Kedua, Pertimbangan Hakim atas Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Terkait Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi. Berdasarkan permohonan perkara dispensasi perkawinan pada tingkat pertama dengan Nomor:0099/Pdt.P/2016/PA.Bi di atas, hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah. Pertimbangan tidak hanya didasarkan pada

bukti-bukti surat tertulis saja, namun juga mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam hal ini saksi adalah calon istri dan calon suami.

Pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur didasarkan pada kenyataan serta kondisi calon istri dan pemohon. Pemohon dalam hal ini adalah kakek dan calon istri baru berusia 15 tahun 5 bulan, sementara orang tua calon istri sampai keputusan itu ditetapkan, tidak ada kabar dan meninggalkan anaknya. Kondisi calon istri merupakan cucu pemohon dan telah lama ditinggalkan orang tuanya. Pertimbangan hakim yang lain adalah bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga secara syar'i menurut hadist dalam pemahaman hakim layak untuk melangsungkan pernikahan.

Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Boyolali Dalam Mensikapi Fenomena Perkawinan di Bawah Umur. Upaya pencegahan dilakukan dengan melalui sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang resiko pernikahan usia dini. Sementara BKKBN mensosialisasikan kesehatan reproduksi bagi siswa-siswi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa sejak dini. Upaya ini belum cukup efektif menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Boyolali terbukti pada tahun 2016 ada 63 permohonan dispensi nikah dan pada tahun 2017 terdapat 59 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Boyolali.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada Kantor Pengadilan Kabupaten Boyolali. Hendaknya hanya memberikan dispensasi menikah hanya kepada pemohon-pemohon yang sudah memenuhi kriteria syar'i seperti pada pemohon di atas. Sekiranya perlu adanya saksi-saksi lain selain keterangan dari saksi yang sudah ada untuk memperkuat keterangan dari pemohon.

Kepada Masyarakat. Orang tua hendaknya memperhatikan usia anaknya apabila hendak menikahkan meskipun menikahkan anak merupakan bagian dari kewajiban orang tua. Dengan mempertimbangkan usia dan pertimbangan-

pertimbangan lain, sesungguhnya merupakan bagian dari pencegahan yang lebih buruk setelah pernikahan dilangsungkan.

PERSANTUNAN

Naskah Publikasi ini penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas do'a, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kedua kakak tersayang, terimakasih atas do'a, dorongan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan serta doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shaheed, 2009, *Tinjauan Fiih Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Gaul.
- Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor : Kencana
- Hamid Potilima, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Alfabeta.
- Jonathan Sarwono, 2011, *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif secara Benar*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Solopos.com*, Jumat 1/8/2014 diakses 08 April 2017 jam 15.30 WIB
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974